BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam perumusan masalah, hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini terkait dengan kondisi kerawanan pangan di Nusa Tenggara Barat sebelum adanya bantuan dari *World Food Programme* (WFP) yaitu program *Food For Asset* (FFA), upaya yang dilakukan oleh *World Food Programme* (WFP) melalui program *Food For Asset* (FFA), kendala yang dihadapi dan hasil program *Food For Asset* (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.

4.1 Kondisi Kerawanan Pangan di Nusa Tenggara Barat Sebelum Adanya Program *Food For Assets* (FFA) *World Food Programme* (WFP)

Provinsi Nusa Tenggara Barat diidentifikasi sebagai salah satu yang paling rawan di Indonesia dalam hal kesiapan dan kapasitas untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Ancaman iklim terhadap wilayah meliputi bermacam-macam keadaan yang berhubungan dengan cuaca karena perubahan pola musiman, penurunan yang signifikan dalam musim hujan, dikombinasikan dengan kenaikan suhu. Dampak dari perubahan iklim mungkin secara signifikan meningkatkan ancaman terhadap wilayah yang berpotensi mngalami kerawanan pangan, khususnya masyarakat lokal yang masih menggantungkan atau bergantung pada sistem pertanian tradisional (Wawancara, Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, musim di Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk jenis tropis dengan musim hujan dari bulan Oktober-Maret dan musim kemarau dari April-September. Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat sensitif terhadap perubahan iklim.Pada tahun 2007 terjadi produksi padi dan jagung menurun. Kerusakan padi yang paling parah ditemukan di Bima (9,85%), Lombok Tengah (7,0%) dan diikuti oleh Dompu (5,39%) dan Sumbawa Barat (2,41%). Level tertinggi dari kerusakan tanaman jagung di Sumbawa Barat (40,65%) diikuti oleh Dompu (10,48%) (Badan Pusat Statistik, Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2010).

Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh bahaya iklim. Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih cukup tinggi, hal ini sangat berpotensi menyebabkan masyarakat yang masuk kategori miskin akan memiliki masalah dalam mengakses pangan.

Penyebab utama kerawanan pangan yang mengakibatkan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, hal ini menyebabkan kesulitan untuk memasuki dan bersaing di lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumberdaya untuk mengembangkan usaha. Kerawanan pangan dikelompokkan menjadi dua yaitu kerawanan pangan *transient* atau sementara dan kerawanan pangan kronis. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pangan sebagai akibat terbatasnya kemampuan secara ekonomi, sedangkan kerawanan pangan *transient* atau sementara adalah kerawanan pangan yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam, konflik sosial,

gagal panen karena kekeringan, serangan hama yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pangan. Kemiskinan penduduk secara langsung dapat berpengaruh pada kerawanan pangan yang sementara ke kerawanan pangan yang kronis (http://bkp.deptan.go.id/Diakses 15 Mei 2014).

Meskipun ketersediaan pangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melampaui kebutuhan konsumsi yang ditunjukkan oleh adanya surplus beras sebesar 305.986 ton pada tahun 2007 dan 434.109 ton pada tahun 2008, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa di Nusa Tenggara Barat masih ditemukan beberapa wilayah yang belum mampu menyediakan produksi pangan sumber karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya (rawan pangan), baik dari aspek kuantitas maupun dari aspek kualitas. Di sisi lain, usahatani padi di beberapa wilayah seringkali mengalami kegagalan panen sebagai akibat dari rendahnya ketersediaan sumberdaya air dan serangan hebat hama penyakit. Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator aksesabilitas rumah tangga terhadap pangan. Hal ini juga berkorelasi dengan kemampuan dan daya beli rumah tangga itu sendiri (Badan Ketahanan Pangan, Renstra BKP 2009-2013).

Penciptaan lapangan pekerjaan perlu dikembangkan agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya. Kondisi kerawanan pangan baik di tingkat wilayah maupun di tingkat rumah tangga akan menjadi ancaman serius bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Kerawanan pangan dapat terjadi bukan hanya karena kondisi ketidakmampuan wilayah ataupun ketidakmampuan rumah tangga untuk menyediakan pangan

sesuai kebutuhannya, tetapi kerawanan pangan juga dapat terjadi karena adanya kondisi-kondisi *transient* seperti terjadinya bencana alam yang akibatnya berkepanjangan (WFP Indonesia *In Review*, 2012).



Sumber: (Nusa Tenggara Barat, *Factsheet*).

Gambar 4.1
Kerusakan Lahan Akibat Perubahan Iklim di Nusa Tenggara Barat

Dalam gambar 4.1, terlihat kerusakan lahan yang diakibatkan oleh perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat, hal ini juga bisa disebut degradasi lahan, dimana proses kondisi lingkungan berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan tersebut cenderung merusak. Beberapa bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan merupakan hasil secara tidak langsung dari aktivitas manusia sehingga dampaknya bisa disebut sebagai degradasi lahan. Degradasi lahan memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan.

Tabel 4.1
Masalah Kerawanan Pangan Akibat Perubahan Iklim di Nusa Tenggara Barat 2007

No	Akibat Perubahan Iklim
1	Menurunnya daya dukung ekologis yang ditandai dengan meluasnyadegradasi hutan dan lahan kritis. Konsekuensinya adalah terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya air (mata air dan sungai) yang diperkirakan akan mengancam 70% lahan pertanian dan pasokan air bersih bagi masyarakat. Dampak ini juga terlihat di daerah pesisir dan laut dimana terjadi abrasi dan degradasi hutan bakau yang signifikandan 44% terumbu karang mengalami kerusakan.
2	Meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan ekstrim pada variabilitas iklim yang tidak menentu. Hal ini ditandai dengan terjadinya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau yang berdampak pada meluasnya daerah puso pada musim hujan mencapai 2,712 ha dan kekeringan pada lahan padi mencapai 6,272 ha. Gelombang laut dan air laut pasang yang terjadi hampir sepanjang tahun 2007 mengakibatkan nelayan kesulitan dalam mencari nafkah.
3	Lebih dari 400 titik mata air di Nusa Tenggara Barat telah hilang dan telah menyebabkan terjadinya defisit air akibat menurunnya ketersediaan air, sementara pemanfaatan air cenderung semakin tinggi.
4	Meningkatnya kerentanan sosial akibat usaha tani dan nelayan yang tidakdapat memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama dalam pemenuhan pangan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi penghidupan rumah tangga.
5	Ketidakpedulian dan apatisme para pihak terhadap fenomena alam dan kerusakan lingkungan, baik dari segi kebijakan dan implementasinya
6	Sistem Informasi penyediaan dan pemanfaatan variabilitas iklim belum optimal.

Sumber: (*Food Security and Vulnerability Atlasof* Nusa Tenggara Barat, 2010).

Secara umum, dampak perubahan iklim berkaitan erat dengan kerawanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdampak pada turunnya daya dukung lingkungan, terganggunya sumber penghidupan dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, seperti kenaikan suhu yang berpotensi meningkatkan kebutuhan air tanaman, menurunkan mutu hasil panen dan meningkatkan peluang berkembangnya hama dan penyakit pada tanaman dan ternak unggas dan ruminansia kecil (kambing dan domba). Perubahan pola hujan berpotensi menjadikan penurunan curah hujan pada awal musim panen sehingga dapat terjadi gagal panen. Kekeringan dan curah hujan yang sangat ekstrim pada fase pembungaan atau penyerbukan dapat menyebabkan terjadinya gagal tanam. Potensi penurunan ketersediaan air yang diakibatkan oleh kekeringan yang umumnya terjadi dari sedang hingga tinggi dengan disaat yang bersamaan potensi banjir dari kecil hingga sedang. Di samping itu, laju deforestrasi yang terus meningkat menyebabkan sumber mata air dan sumber irigasi (wilayah DAS) jauh berkurang. Peningkatan suhu udara dan suhu permukaan air laut mengancam terumbu karang di perairan dalam dan habitat ekosistem pesisir yang berdampak pada menurunnya sumber penghidupan masyarakat nelayan. Tumbuh suburnya organisme yang dapat mengganggu kesehatan manusia seperti malaria dan kolera. Keadaan ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang belum memperhatikan secara saksama tentang prilaku hidup bersih dan sehat. Banjir, kekeringan dan longsor dapat mengganggu pola dan infrastruktur distribusi pangan sehingga distribusi dan konsumsi pangan tidak efektif dan efisien sampai

pada tingkat rumah tangga (*Food Security and Vulnerability Atlasof* Nusa Tenggara Barat, 2010).

Meningkatnya dampak perubahan iklim yang meliputi perubahan pola hujan yangsemakin tidak menentu, peningkatan suhu udara, meningkatnya kejadian bencana terkait iklim ekstrim, kekeringan, dan banjir, akan semakin memperburuk situasi masyarakat di wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Hal ini merupakan tantangan serius bagi Nusa Tenggara Barat. Upaya bersama sangat diperlukan untuk melindungi dan memperkuat penduduk yang rawan dalam mengatasi dampak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim (Wawancara, *Senior Programme Assistant-World Food Programme*).

Menurut *World Food Programme*, ada beberapa hal untuk mengetahui sebab-sebab utama terjadinya kerawanan pangan sementara atau *transient* di Nusa Tenggara Barat yang timbul akibat perubahan iklim, diantaranya adalah rawannya bencana alam, fluktuasi curah hujan, daerah puso, dan deforestasi hutan.

4.1.1 Bencana Alam di Nusa Tenggara Barat

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana alam di dunia berdasarkan pada kejadian besar yang didokumentasikan oleh Pusat Penelitian tentang Epidemiologi Bencana (*Centre for Research on the Epidemiology of Disasters* – CRED). Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di provinsi NTB terjadi lebih dari 191 kejadian bencana alam selama periode tahun 1990-2009 yang telah menyebabkan 49 orang meninggal dunia. Data bencana alam tersebut termasuk kejadian tingkat

besar kecilnya bencana yang meliputi: angin topan, banjir, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan dan Epidemi (*Food Security and Vulnerability Atlasof* Nusa Tenggara Barat, 2010).

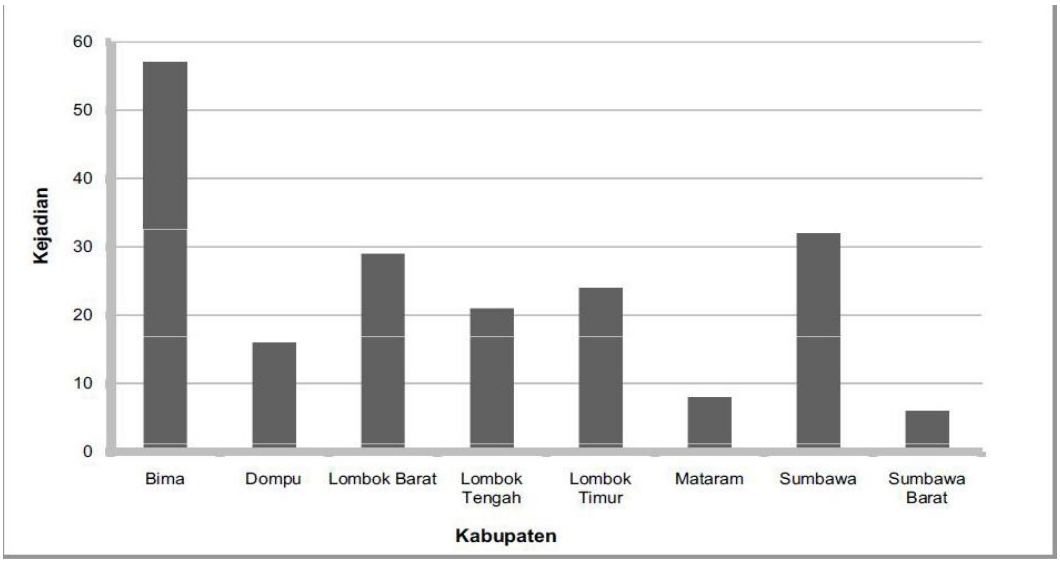
Tabel 4.2
Ringkasan Tabel Bencana Alam yang Terjadi di Provinsi Nusa Tenggarab Barat dan KerusakannyaSelama Periode 1990-2009

Kejadian	# Kejadian	Meninggal	Terluka	Rumah Hancur Berat	Rumah Rusak	Lahan Pertanian (Ha)
Banjir	47	4	762	1,390	8,291	6,106
Banjir dan Tanah Longsor	3	4	46	1,028	2,503	-
Tanah Longsor	5	8	8	15	-	-
Gempa Bumi	17	6	250	6,610	20,297	-
Kekeringan	48	-	-	-	-	35,516
Kebakaran	41	4	1	370	52	-
Epidemic	4	22	987	-	-	-
Angin Topan	20	1	-	1,416	765	-
Gelombang Pasang	6	-	-	86	10	-
Total	**191**	**49**	**2,054**	**10,915**	**31,918**	**41,622**

Sumber: (BNPB, http://dibi.ntbprov.go.id Diakses 15 Mei 2014).

Menurut tabel 4.2, kekeringan pada tahun 1997 sampai 1998 di NTB menyebabkan 8,400 Ha tanaman padi mengalami kekeringan berat dan lebih kurang 1,400 Ha diantaranya mengalami puso yang mengakibatkan menurunnya produksi pangan pada periode tersebut. Data terbaru menunjukkan komoditas padi dan jagung juga mengalami penurunan produksi akibat puso selama periode 2007-2009. Kerusakan tanaman padi terjadi di tahun 2008 (0,80%), tahun 2009 (0,41%) dan tahun 2007 (4,04%). Pada tahun 2007 tingkat kerusakan terparah tanaman padi ditemukan di Bima (9,85%), Lombok Tengah (7,0%) dan diikuti Dompu (5,39%) serta Sumbawa Barat (2,41%). Demikian pula pada kerusakan tanaman jagung pada tahun 2008 (0,56%), tahun 2009(0,18%) dan tahun 2007 (9,23%). Pada tahun 2007, tingkat kerusakan tertinggi tanaman jagung terdapat di

Sumbawa Barat (40,65%) diikuti Dompu (10,48%) (BPS, 2009: *Food Security and Vulnerability Atlas of* Nusa Tenggara Barat, 2010).



Sumber: (BNPB, http://dibi.ntbprov.go.id Diakses 15 Mei 2014).

Gambar 4.2
Bencana Alam yang Terjadi di Nusa Tenggara Barat per-Kabupaten Selama Periode 1990-2009

Bencana alam yang terjadi di masing-masing kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertera pada gambar 4.2, bencana alam paling sering terjadi di kabupaten Bima, diikuti oleh Sumbawa dan Lombok Barat.

4.1.2 Fluktuasi Curah Hujan di Nusa Tenggara Barat

Variabilitas iklim di suatu wilayah secara langsung mempengaruhi berbagai aspek, khususnya dalam hal ketersediaan pangan dan distribusi pangan di wilayah yang bersangkutan. Peristiwa bencana alam seperti kekeringan dan banjir, berkaitan erat dengan karakteristik dan fluktuasi curah hujan. Kekeringan dan banjir disebabkan oleh variasi curah hujan ekstrem yang diterima oleh setiap wilayah geografis. Variasi iklim atau curah hujan di NTB sangat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, yaitu faktor global,regional maupun lokal, faktor global antara lain adalah fenomena El-Nino, La-Nina, dan Dipole Mode, sedangkan faktor regional antara lain Sirkulasi Monsun, Madden Julian Oscillation (MJO), dan suhu muka laut perairan Indonesia. Sementara itu, faktor lokal yang berpengaruh adalah ketinggian tempat, posisi bentangan suatu pulau, sirkulasi angin darat dan angin laut, serta tutupan lahan suatu wilayah. Iklim yang ekstrim menyebabkan banjir selama musim hujan dan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan. Iklim juga dapat menyebabkan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Dengan adanya banjir, kekeringan dan OPT dapat berdampak pada pertumbuhan tanaman tidak sempurna dan menyebabkan gagal panen atau puso. Persentase penyimpangan curah hujan rata-rata 10 tahun (2000-2009) terhadap normalnya (rata-rata curah hujan 30 tahun), periode 1970-1999 di NTB untuk periode musim kemarau (April - September) dan periode musim hujan (Oktober - Maret). Hampir semua wilayah di NTB memiliki curah hujan di bawah normal jika dibandingkan antara rata-rata 30 tahun dengan periode tahun 2000-2009 pada musim kemarau, kecuali bagian utara kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki curah hujan normal. Sementara itu, selama musim hujan, daerah yang mengalami penurunan intensitas hujan adalah bagian utara Lombok, barat laut Sumbawa, dan bagian timur dan barat Bima. Sementara bagian utara dan bagian tengah Bima mengalami peningkatan intensitas curah hujan (*Food Security and Vulnerability Atlas of* Nusa Tenggara Barat, 2010).

4.1.3 Daerah Puso di Nusa Tenggara Barat

Daerah puso didefinisikan sebagai suatu daerah produksi pangan yang rusak karena disebabkan oleh bencana alam (banjir, kekeringan, longsor) dan penularan hama oleh Organisme Penggangu Tanaman (OPT). Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Kegiatan budidaya tanaman sebaiknya mempertimbangkan kondisi tersebut dengan menggunakan informasi perubahan musim, iklim dan cuaca (*Food Security and Vulnerability Atlas of* Nusa Tenggara Barat, 2010).

Tabel 4.3
Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung terhadap Luas Area Tanam Padi dan Jagung Tahun 2006 – 2009

Kabupaten	Padi (%)				Jagung (%)			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Lombok Barat	0.07	0.77	0.05	0.17	0.28	0.68	0.00	0.00
Lombok Tengah	0.04	7.00	1.13	1.55	0.00	4.23	0.00	0.00
Lombok Timur	0.08	1.59	0.00	0.03	0.40	1.00	0.24	0.03
Sumbawa	0.37	1.26	1.51	0.10	0.05	1.94	0.00	0.64
Dompu	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	10.48	0.08	0.00
Bima	2.06	9.86	1.07	0.99	0.09	5.67	0.00	0.60
Sumbawa Barat	1.95	2.41	1.81	0.05	0.00	40.65	3.61	0.00
Total NTB	**0.65**	**4.04**	**0.80**	**0.41**	**0.12**	**9.23**	**0.56**	**0.18**

Sumber: (Sensus Pertanian 2009, Badan Pusat Statistik).

Menurut Tabel 4.3, kerusakan tanaman padi terjadi di tahun 2007 (4,04%), tahun 2008 (0,80%), tahun 2009 (0,41%). Pada tahun 2007 tingkat kerusakan terparah tanaman padi ditemukan di Bima (9,85%), Lombok Tengah (7,0%) yang diikuti Dompu (5,39%) dan Sumbawa Barat (2,41%). Kerusakan tanaman jagung dengan persentase yang kecil pada tahun 2008 (0,56%), tahun 2009 (0,18%) dan tahun 2007 (9,23%). Pada tahun 2007, tingkat kerusakan tertinggi tanaman jagung terdapat di Sumbawa Barat (40,65%) diikuti Dompu (10,48%).

4.1.4 Deforestasi Hutan di Nusa Tenggara Barat

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih cukup tinggi terutama masyarakat yang berada didalam dan sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan pertanian dan sumber penghidupan lainnya. Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) 2006 dan peta kawasan hutan untuk provinsi NTB, terdapat 34 desa (4,15%) dari total 820 desa yang berada di dalam kawasan hutan dan 222 desa (27,07%) berada di tepi kawasan hutan. Pada kelompok desa yang berada di dalam kawasan hutan, terdapat 33 desa (97,06%) yang mempunyai mata pencaharian utama dari sektor pertanian. Sedangkan pada kelompok desa lainnya, sumbermata pencaharian ini terdapat pada 219 desa (98,65%). Sejalan dengan perkembangan pembangunan, berbagai aktifitas pembangunan telah menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penutupan lahan pada kawasan hutan berjalan dengan cepat yang dapat menyebabkan menurunnya kondisi hutan dan berkurangnya luas penutupan hutan. Laju deforestasi seluruh daratan Indonesia selama periode 2003-2006 adalah sebesar 1,17 juta hektar per-tahun. Pada periode yang sama laju deforestasi di provinsi NTB adalah sebesar 58.840 hektar per-tahun, dimana menempatkan NTB sebagai provinsi ke-enam yang memiliki laju deforestasi tertinggi diantara 33 provinsi di Indonesia, setelah provinsi Kalimantan Timur, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Laju deforestasi di NTB ini meliputi deforestasi di dalam kawasan hutan sebesar 22,24ribu hektar per- dan 36,60 ribu hektar per- di luar kawasan hutan. Penyebab berkurangnya hutan adalah kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk permukiman atau transmigrasi, pertambangan dan lain-

lain. Dengan tingginya angka laju deforestasi, maka ancaman terhadap hutan-hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih mengkhawatirkan. Deforestasi hutan akan memberi dampak terhadap ketahanan pangan penduduk miskin pedesaan yang hidup di dalam atau di dekat kawasan hutan dan yang bergantung pada keanekaragaman hayati dan habitat alam untuk penghidupannya karena hutan merupakan sumber utama dari buah-buahan, tumbuhan obat, dan tumbuhan yang dapat dimakan. Masyarakat pedesaan yang paling miskinlah yang pertama dan paling menderita bila habitat-habitat tersebut dirusak atau dimusnahkan. Dari segi kelangsungan lingkungan hidup, maka degradasi hutan akan memberi dampak terhadap sumber air. Erosi tanah sebagai akibat dari pembersihan lapisan penutup tanah, akan menyebabkan sedimentasi atau endapan pada jalan air, yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan di hilir atau dataran rendah. Kekurangan air juga akan mempengaruhi sistem pertanian, perikanan dan pengoperasian bendungan. Rehabilitasi hutan dan lahan mutlak perlu dilakukan untuk mengurangi laju degradasi hutan sehingga dapat mempertahankan daya dukung hutan terhadap kehidupan (*Food Security and Vulnerability Atlasof* Nusa Tenggara Barat, 2010).

4.2 Upaya-upaya yang Dilakukan oleh *World Food Programme* (WFP)

Melalui Program *Food For Assets* (FFA) dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Nusa Tenggara Barat

Masyarakat yang mengalami rawan pangan di Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat petani yang berusaha mempertahankan hidup dengan mengandalkan

sektor pertanian. Dengan segala kemampuan dan keterampilan yang terbatas, namun berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi kerawanan pangan, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan masyarakat maupun membuka peluang kerja bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli untuk mengakses pangan.

Kemampuan yang terbatas membuat mereka terbelakang, dan terlilit dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak mengaktualisasikan dirinya karena berbagai keterbatasan yang dialaminya (Suryono, 2010:261).

Keadaan tersebut disebabkan karena kerawanan pangan dan persoalan-persoalan lainnya. Untuk mengurangi potensi rawan pangan di wilayah yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada pertanian, maka perlu mengoptimalkan bidang-bidang pertanian sebagai jalan utama untuk mengelola potensi sumber daya yang ada melalui kebijakan yang diikuti dengan pola pendampingan yang tepat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu upaya membuat masyarakat dapat mengatur dirinya secara mandiri agar secara bebas mengambil tindakan-tindakan, membuat keputusan-keputusan terhadap apa yang akan ia laksanakan. Pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik dari individu, kelompok maupun masyarakat (Wasistiono, 2003:18).

Pemberdayaan tidak terlepas dari pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin yaitu pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komonikator dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Suryono, 2010:262).

Upaya yang telah dilakukan *World Food Programme* adalah mengembangkan cara-cara tambahan untuk mengurangi potensi rawan pangan dan berupaya meningkatkan ketahanan pangan sambil beradaptasi terhadap perubahan iklim. Berbagai intervensi *World Food Programme* di tingkat lapangan sudah mendukung masyarakat untuk mengatasi periode kerawanan pangan dan membantu membangun ketahanan pangan di tingkat masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Melalui program *Food For Assets* (FFA), *World Food Programme* bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara Barat membantu masyarakat dan rumah tangga yang paling rentan mengalami kerawanan pangan sementara atau *transient* yang berpotensi mengalami kerawanan pangan kronis, dengan kesempatan bekerja untuk menghasilkan aset infrastruktur pertanian dan pedesaan skala kecil yang bermanfaat bagi masyarakat. Aset dirancang untuk memperkuat ketahanan untuk masyarakat bisa bertahan dalam keadaan perubahan iklim, dan untuk mempertahankan mata pencaharian dan ketahanan pangan masyarakat (WFP Indonesia *In Review*, 2012).

World Food Programme bersama pemerintah Nusa Tenggara Barat telah mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA Nusa Tenggara Barat (*Food Security and Vulnerability Atlas of West Nusa Tenggara*) untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan di Nusa Tenggara Barat yang memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi daerah-daerah rawan pangan dan untuk menargetkan masyarakat yang paling rawan yang bisa mengalami rawan pangan yang kronis diakibatkan oleh risiko perubahan iklim. Sejak tahun 2006, *World Food Programme* juga telah bekerja sama dengan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan membuat Indonesia Buletin Peringatan Dini Bencana Alam. Buletin ini memberikan informasi tentang pola cuaca terbaru dan membuat perkiraan tentang kemungkinan kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya. *World Food Programme* memperluas kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan dukungan pada sistem monitoring keamanan pangan untuk peringatan dini dan perencanaan respon yang tepat waktu dimana kerawanan pangan bersimpangan dengan risiko iklim (Nusa Tenggara Barat, *Factsheet*).

Dalam hal meningkatkan hasil pertanian dengan cara yang berkelanjutan, upaya yang dilakukan oleh *World Food Programme* melalui program *Food For Assets* adalah penyuluhan pertanian atau pemberdayaan masyarakat yang mengalami rawan pangan, penyuluhan pertanian memegang peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang cara bertani yang baik kepada petani. Adanya perkembangan yang sistematis untuk pengaturan penanaman

dalam rangka meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan produktivitas pangan dan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Managemen pengelolaan air diberikan prioritas pada daerah yang memiliki tingkat erosi lahan dan serta aliran air permukaan lahan yang tinggi. Pengukuran yang sederhana seperti saluran air, teras sering, bendungan dan lain-lain dapat memperbaiki kegiatan usahatani. Pengukuran dilakukan oleh kabupaten yang surplus produksi dengan melakukan kegiatan padat karya pangan (*food for assets* atau *food for work*) untuk melakukan perbaikan konservasi tanah dan air. Pangan akan dapat membantu rumah tangga yang rawan pangan dalam mendapatkan pangan untuk kebutuhan mereka serta memberikan keuntungan untuk perbaikan kondisi kesuburan tanah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan (Nusa Tenggara Barat, *Factsheet*).

Dalam program *Food For Assets* di Nusa Tenggara Barat, *World Food Programme* juga berupaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, masyarakat dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam bencana. Persiapan menghadapi bencana lebih dilakukan dengan cara membentuk suatu kelompok seperti kelompok pengelolaan air dan pemanenan, pengembangan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mendadak, promosi program reklamasi lahan dan masyarakat hutan dapat membantu meningkatkan sumberdaya dasar sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan alam (WFP Indonesia *In Review*, 2012).

Kemampuan untuk memenuhi pangan yang bersumber dari dalam daerah tanpa melalui impor menggambarkan tingkat kemandirian pangan yang baik,

dalam arti kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Kemandirian pangan harus dapat diwujudkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi seluruh permasalahan yang ada termasuk didalamnya adalah permasalahan pangan, menuntut adanya kemampuan mandiri dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan pangan di lingkungan sekitarnya, terutama di daerah yang bukan sentra produksi pangan.

4.2.1 Tahapan Terlaksananya Program *Food For Assets*

4.2.1.1. Kebijakan atau Strategi

Pelaksanaan program *Food For Assets* harus memiliki hubungan dengan Kebijakan atau Strategi, antara lain:

1. Saat ini sebagian besar program bantuan *Food For Assets* sejalan dengan tujuan Operasi Pertolongan dan Pemulihan (*Protracted Relief and Recovery Operation*-PRRO) No.10069.2, MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *World Food Programme*.
2. Sejalan dengan tujuan nasional: Strategi Penanggulangan Kemiskinan (*Poverty Reduction Strategy Paper*-PRSP).
3. Meningkatnya minat donor dalam agenda ketahanan pangan.
4. Perjanjian dengan: Departemen Pembangunan Internasional (*Department for International Development*-DFID), Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agricultural Organization*-FAO) (*Food For Assets Briefing Note*).

Program bantuan *Food For Assets* adalah ide di balik program pembangunan yang menggunakan sumber daya bantuan pangan, kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan pengembangan keterampilan masyarakat setempat. Tujuannya adalah *World Food Programme* berupaya agar dapat menghasilkanmasyarakat yang terampil dalam pengolahan pangan dengan tekhnologi dan pemanfaatan aset alam (lokal), pemberdayaan masyarakat, menciptakan keadaan sosial masyarakat yang bergotong royong, rasa saling memiliki dan menjaga aset yang telah dibangun oleh masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi konflik sosial.

Dalam melaksanakan atau memberi bantuan, *World Food Programme* memiliki alasan mengapa program *Food For Assets* dijalankan di Nusa Tenggara Barat, selain wilayah tersebut dikategorikan wilayah yang mengalami rawan pangan transient atau sementara, diantaranya adalah:

1. MoU dengan Pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan arah strategis *World Food Programme* dari *Emergency Operation* (EMOP) ke *Protracted Relief and Recovery Operation* (PRRO) dan menciptakan aset untuk membangun ketahanan pangan di setiap wilayah.
2. Penilaian dan studi yang dilakukan oleh lembaga bervariasi menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengatasi rawan pangan, dan masyarakat mendapatkan ilmu-ilmu keterampilan melalui keterlibatan dalam program *Food For Assets*.
3. Pengembangan arah strategis menekankan bahwa kondisi rawan pangan sementara atau *transient* bisa ditangani oleh kemandirian masyarakat

setempat, dan keterampilan yang sudah diberikan *World Food Programme* melalui *desining* proyek berkelanjutan seperti *Food For Assets*.

4. Lingkungan yang kondusif dari darurat akibat perubahan iklim ke pembangunan untuk mengembalikan aset-aset masyarakat.
5. Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, organisasi berbasis komunitas (*Community Based Organizations*-CBO) dan penerima bantuan (masyarakat) untuk menghubungkan bantuan pangan ke pembangunan daerah.
6. Minat donor untuk mendanai *Food ForAssets*(*Food For Assets Briefing Note*).

Food For Assets memiliki dua komponen, yaitu bagian ketahanan pangan dengan menjamin ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan, dan bagian pembangunan dengan restorasi aset, keterampilan masyarakat (pemberdayaan) dan pembangunan aset sosial.

4.2.1.2 Persyaratan Program *Food For Assets*

Upaya lainnya yang dilakukukan oleh *World Food Programme*, ketika dalam mengimplementasikan program *Food For Assets* di Nusa Tenggara Barat, hal utama adalah diawali dengan adanya persyaratan program dapat berjalan, yaitu:

1. Seluruh kualitas teknis dari perencanaan hingga pengawasan
2. Pemeliharaan pasca program (harus layak dengan sumber daya yang tersedia secara lokal)

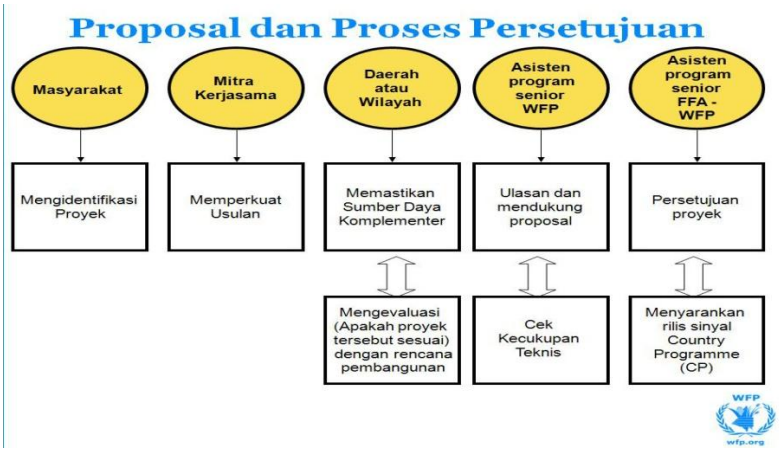
3. Gaji atau bayaran untuk warga yang ikut serta dalam kegiatan *Food For Assets* diatur dalam referensi untuk tingkat upah lokal dan nilai makanan di pasar lokal
4. Sumber daya komplementer (yang melengkapi) untuk barang-barang non-makanan ke dalam program *Food For Assets* (*Food For Assets Briefing Note*).

Food For Assets tepat diterapkan di Nusa Tenggara Barat dikarenakan masyarakat yang dihadapkan dengan kombinasi defisit pangan musiman, penduduk atau masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang mengalami rawan pangan sementara yang terkena bencana alam, masyarakat yang menerima bantuan dari *World Food Programme* di Nusa Tenggara Barat mampu dan bersedia ikut serta dalam kegiatan yang *Food For Assets,* karena sebagian besar manfaat juga untuk masyarakat sendiri, program *Food For Assets* adalah kesempatan bagi penduduk Nusa Tenggara Barat, karena *World Food Programme* membantu masyarakat untuk keluar dari kondisi rawan pangan dan mulai memulihkan kehidupan dan mata pencaharian mereka agar tidak terjadi rawan pangan yang kronis juga bisa menciptakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan masyarakat.

4.2.1.3 Target Program*Food For Assets*

Dalam hal menargetkan suatu wilayah dapat melaksanakan program *Food For Assets* (FFA), World Food Programme meninjau dari berbagai segi seperti keadaan geografis, adanya dukungan dari pemangku kepentingan: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Mitra Kerjasama (LSM nasional dan internasional),

organisasi berbasis komunitas (*Community Based Organizations*-CBO). Lokasi, wilayah prioritas tinggi dan menengah berdasarkan Kebutuhan Tahunan dan Analisis Mata Pencaharian (*Annual Needs and Livelihood Analysis*-ANLA), Survei ketahanan pangan dan gizi, termasuk Klasifikasi Terpadu Fase Ketahanan Pangan (*Integrated Food Security Phase Classification*-IPC), dan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*-FSVA).Penerima manfaat atau bantuan, yaitu masyarakat atau daerah yang mengalami rawan pangan, dan wilayah yang mengalami bencana alam.Wilayah yang mengalami rawan pangan sementara akibat perubahan iklim, namun berupaya untuk menghindari dari kerawanan pangan kronis, dan berupaya untuk mencapai ketahanan pangan dan kemandirian pangan, dengan aset produktif (untuk memulihkan keadaan dan mengembangkan keadaan.



Sumber: (*World Food Programme, Food For Assets Briefing Note*).

Gambar 4.3
Proposal dan Proses Persetujuan
Food For Assets Dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat

Pada gambar 4.3 terlihat tugas dan peran dimana program *Food For Assets* bisa dilaksanakan, masyarkat yang mengidentifikasi proyek atau program, mitra kerjasama seperti NGO yang memperkuat usulan program, daerah yang

mendapatkan bantuan program harus memastikan sumber daya dan mengevaluasi, staff WFP pusat memberikan ulasan dan mendukung program dilaksanakan dan melihat kecukupan secara teknis, dan staff WFP yang ditunjuk oleh WFP untuk menangani FFA di Nusa Tenggara Barat sebagai *Assistant* Program FFA yang akan menyetujui program tersebut bisa dilaksanakan.

4.2.1.4 Pelaksanaan Program *Food For Assets*

Program*Food For Assets* dilaksanakan dalam 5 kategori daerah yang disebut Lima Daerah Tematik, yaitu:

1. Pertanian:
    a. Pengelolaan lahan dan diversifikasi (penganekaragaman)
    b. Pemanfaatan air, terdiri dari permukaan (sungai, bendungan), air tanah (sumur dangkal, sumur bor) atau air hujan (kolam pertanian, bendungan kecil)
    c. Energi, kebutuhan air untuk lahan pertanian (pompa), pilihan energi hijau: matahari, angin.
    d. Aplikasi air: Parit (saluran air buatan), bak atau kolam atau lembah sungai, kendi (tempat atau pot yang bisa digunakan untuk menyiram (tempat yang harus berlubang atau berpori) atau alat penyiraman
    e. Pasca panen
2. Peternakan
    a. Memanajemen makanan ternak, umpan, dan padang rumput
    b. Pembangunan kolam air

c. Unggas rumah tangga dan peternakan lebah

d. Dukungan para nelayan

3. Lingkungan, sumber daya alam dan adaptasi iklim

a. Pembuatan tempat menanam tanaman, dan reboisasi (penanaman kembali hutan gundul)

b. Pengendalian luapan bendungan atau dam

c. Wanatani atau *agroforestry* adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian. Model-model wanatani bervariasi mulai dari wanatani sederhana berupa kombinasi penanaman sejenis pohon dengan satu-dua jenis komoditas pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian, dan bahkan juga dengan ternak atau perikanan. Dalam bentuk yang dikenal umum, wanatani ini mencakup rupa-rupa kebun campuran, tegalan berpohon, ladang, lahan bera (belukar), kebun pekarangan, hingga hutan-hutan tanaman rakyat yang lebih kaya jenis.

4. Infrastruktur Berbasis Masyarakat

a. Jalan penghubung dan trotoar atau jalan kecil

b. Sekolah, unit kesehatan dan rehabilitasi

5. Pelatihan keterampilan di semua disiplin

a. Kejujuran

b. Diberbagai sektor atau bidang

c. FFS (*Farmer Field Schools*) Sekolah Lapangan Petani (*Food For Assets Briefing Note*).

Padat karya pangan atau program *Food For Assets* (disebut juga *Food For Work*) menggunakan alat-alat sederhana, dengan risiko rendah tetapi berdampak besar dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan pada setiap masyarakat, sasaran langsung pada lokasi masyarakat yang membutuhkan dan diklasifikasikan kepada wilayah yang mengalami rawan pangan atau berpotensi mengalami rawan pangan kronis. Rangkaian program yang sebaik-baiknya (tepat) seperti kegiatan pertanian lainnya, *Food For Assets* harus sesuai dengan norma-norma budaya dan tradisi, artinya harus bermanfaat bagi masyarakat. Harus ramah lingkungan, tidak mempengaruhi ekologi. Bantuan pangan diberikan sebagian besar hanya di wilayah Lombok, padahal sebagian wilayah di Sumbawa, Dompu, dan Bima juga mengalami rawan pangan. Ini dikarenakan kecamatan di Lombok paling banyak yang mengalami rawan pangan dan masuk kedalam prioritas satu sesuai peta *Food Security and Vulnerability Atlas of* Nusa Tenggara Barat yang disusun oleh *World Food Programme*.

4.2.2 Macam-macam Kegiatan dalam Program *Food For Assets*

1. Kelompok Lumbung Pangan

   Upaya yang dilakukan *World Food Programme* dalam hal pembinaan akan pentingnya kerjasama dalam kelompok untuk mengatasi masalah seperti pembentukan kelompok lumbung pangan, ada beberapa alasan

yang mendasari, pertama Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya, situasi iklim di Nusa Tenggara Barat saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan, masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan, dan banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Disamping itu, cadangan pangan juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

2. *Food For Training*

World Food Programme mengadakan pelatihan kepada 104 petani yang tergabung dalam kelompok petani lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka pada penanganan paska panen, meningkatkan pengetahuan tentang *aflatoksin* dan upaya pencegahannya, tentang pengolahan makanan, dan cara memulai usaha kecil. Meningkatkan kesadaran akan risiko *aflatoksin* dan pencegahannya pada jagung sangat

penting di NTB, karena jagung adalah bahan pokok pokok dan aflatoksin merupakan risiko kesehatan yang serius bagi masyarakat. Kelompok tani juga dilengkapi dengan mesin penggilingan jagung. Sekolah dapat menyiapkan makanan bagi anak-anak dengan menggunakan bahan-bahan yang diproduksi dan digiling secara lokal. Semua produk pangan olahan yang digunakan WFP dibeli di Indonesia. Jagung dan kacang hijau, bahan baku dibeli dari kelompok tani yang yang menjalankan program *Food For Assets*.

3. *Mother and Child Nutrition & School Feeding*

Tujuan utama dari kegiatan MCN adalah untuk mengurangi defisiensi mikronutrien, antara kelompok rentan anak-anak usia 12-59 bulan, ibu hamil dan menyusui dan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi melalui penyediaan biskuit yang diproduksi secara lokal dan mie dengan 9 vitamin dan 5 mineral bersama dengan pendidikan kesehatan dan gizi. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak 1-5 tahun dalam pemantauan pertumbuhan dan pemanfaatan layanan ibu dan kesehatan anak yang disediakan di Posyandu. Dilaksanakan di empat kabupaten di Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur). WFP memberi bantuan 591 Posyandu dan mencapai lebih dari 56.000 penerima manfaat. Aset-aset yang telah dibangun, hasilnya juga selain diberikan kepada masyarakat juga adanya kegiatan penyediaan makanan lokal yang bergizi untuk anak-anak sekolah dan untuk ibu hamil dan menyusui (WFP Indonesia *In Review,* 2012).

4.2.3 Pelaksanaan Program *Food For Assets* di Nusa Tenggara Barat



Sumber: (*World Food Programme, Food For Assets Briefing Note*).

Gambar 4.4
Skema Program *Food For Assets World Food Programme*

Pemantauan program yang dilakukan *stakeholder* (pemangku kepentingan) seperti pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur yang juga menjadi Dewan Ketahanan Pangan dalam program ini, Staff *World Food Programme* yang ditugaskan atau menjabat sebagai *Assistant Program Food For Assets*, LSM nasional dan internasional, informasi dasar melalui contoh sebelum atau pra pembangunan, pemeriksaan untuk memantau proses, pengeluaran dan pemasukan secara teratur dan berkala, studi kasus dan pembelajaran. Diawali dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam program berkonsultasi dan diberikan pemahaman agar lebih sadar akan bahaya iklim yang bisa berdampak pada kondisi dimana mereka mengalami kerawanan pangan sementara berakibat ke kerawanan pangan kronis. Wilayah yang mendapatkan bantuan dari *World Food Programme* akan diidentifikasi untuk selanjutnya pembuatan proposal program. Saat proposal sesesai, proposal akan divalidasi dan disahkan oleh para pemangku kepentingan, dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait didalam

program. Dalam tahapan ini, program bisa dijalankan. Selalu adanya kontrol dari semua pihak, dan pemberian sertifikasi.



Sumber: (Nusa Tenggara Barat, *Factsheet*).

Gambar 4.5
Konservasi Daerah Aliran Sungai Desa Tanak Beak Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

Gambar 4.5 adalah salah satu program *Food For Assets* yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar yang mendapatkan bantuan dari *World Food Programme*. Konservasi daerah aliran sungai (DAS) sangat dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan lahan pertanian dan kebutuhan lainnya agar dapat menghasilkan hasil pertanian untuk kebutuhan masyarakat sendiri dan upaya untuk mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat. Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.



Sumber: (Dokumentasi *World Food Programme*).

Gambar 4.6
Proses Konservasi Daerah Aliran Sungai Desa Tanak Beak Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

Proses konservasi daerah aliran sungai desa Tanak Beak Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada gambar 4.6, kegiatan tersebut menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan kegiatan fisik. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam kegiatan padat karya dan konservasi alam. Aset-aset dirancang untuk menguatkan ketahanan mereka atas perubahan iklim dan dapat segera membantu kelansungan mata pencaharaian dan ketahanan pangan. Difokuskan pada kegiatan menumbuhkembangkan semangat bergotong royong agar bagaimana akses ekonomi bisa terjamin dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahtraan masyarakat. Program yang dirancang untuk pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur dimusim sepi kerja atau hilangnya pekerjaan serta pendapatan akibat bencana alam yang sulit diproyeksikan. Kegiatan padat karya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dengan prioritas dan kriteria disesuaikan kondisi daerah. Polanya adalah mempekerjakan tenaga atau masyarakat selama 4 hari namun diberikan upah (bantuan pangan) diberikan selama 6 hari, didukung seperti pengadaan material.



Sumber: (Nusa Tenggara Barat, *Factsheet*)

Gambar 4.7
Keikutsertaan Perempuan dalam Kegiatan Program *Food For Assets*

Pada gambar 4.7, keikutsertaan perempuan dalam kegiatan program *Food For Assets* dikarenakan selain perempuan diberikan pelatihan-pelatihan oleh *World Food Programme*, seperti pelatihan kewaspadaan bencana, adaptasi perubahan iklim, dukungan mata pencaharian, kebersihan dan carapenanganan makanan yang aman serta pelatihan kesehatan dan gizi, karena menurut *World Food Programme* perempuan sangat berperan dalam memberikan hal-hal terbaik untuk keluarganya.

4.3 Kendala yang dihadapi oleh *World Food Programme* (WFP) Melalui Program *Food For Assets* (FFA) dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Nusa Tenggara Barat

Peneliti melihat selain adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh *World Food Programme* ada pula kendala yang dihadapi, karena pelaksanaan program dari sebuah kerangka kerjasama seringkali ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan program yang disepakati bersama. Seperti halnya dengan *World Food Programme*, pelaksanaan program *Food For Assets* sebagai bentuk upaya mengurangi potensi rawan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis dan non-teknis, yang berasal dari pihak pelaksana di lapangan yaitu penggagas atau fasilitator dalam kerangka kerjasama WFP.

1. Para Staff *World Food Programme* yang bertugas didalam program *Food For Assets* di Nusa Tenggara Barat sering kali kesulitan dalam persoalan akses jalan ke wilayah yang mengalami rawan pangan.
2. Pelaksanaan *Food For Assets* atau padat karya pangan harus menghindari kegiatan padat karya yang mengganggu ekosistem alam dan sosial, yang menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan masyarakat, mengganggu tempat beribadat, juga wilayah yang sulit untuk dipantau.
3. Rawannya terjadi konflik diantara masyarakat setempat yang mendapatkan bantuan, hal ini dikarenakan oleh persoalan lahan pertanian.
4. Sulitnya mendapatkan penterjemah bahasa untuk kebutuhan masyarakat di pedesaan.

5. Kualitas atau keberlanjutan program *Food For Assets*, adanya kekhawatiran terutama mengingat lingkungan yang rawan, kondisi yang kompleks, risiko yang bisa saja merugikan masyarakat (Wawancara, *Senior Programme Assistant-World Food Programme*).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kemitraan *World Food Programme* (WFP) seperti Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BKP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAPPEDA) dalam pelaksanaan program *Food For Assets* sebagai bentuk upaya mengurangi potensi rawan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis dan non-teknis, seperti kendala Pemerintah yang terfragmentasi (terpecah belah) dan kurangnya kapasitas. Dan kendala dalam hal monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk pengkajian dampak terhadap lingkungan, ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat. Kendala lain adalah keberlanjutan asset, dikhawatirkan hasil dari program *Food For Assets* tidak berkelanjutan dikarenakan jangka waktu program yang terbatas. Juga dalam hal pendanaan lanjutan dari Pemerintah (Wawancara, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa kendala lain tidak ada yang signifikan, namun ada indikasi masalah logistik di sekolah yang mendapatkan bantuan makanan sekolah dari hasil pangan lokal yang dihasilkan masyarakat sekitar melalui program *Food For Assets*, bahwa tidak memiliki gudang

penyimpanan, hal ini menyebabkan makanan disimpan di ruang kepala sekolah (Wawancara, Abel Syamsul Hatuina-Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat).

4.4 Hasil Program *Food For Assets* (FFA) dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Nusa Tenggara Barat

Program *Food ForAssets* di NTB melalui proses konsultasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, LSM. Kegiatan FFA yang telah dituntaskan pada tahun 2010 meliputi konservasi kawasan pesisir dengan penanaman bakau, terasering lahan, penghijauan, dan pembangunan bendungan (DAM). Hasilnya adalah 1.056 hektar wilayah pesisir telah terehabilitasi dengan ditanami lebih dari 2,8 juta pohon bakau (*mangrove*), 578 hektar lahan pertanian telah mendapatkan manfaat dari pembuatan irigasi baru, dan 11 hektar kawasan *silvofishery* telah dikembangkan. Masyarakat juga mendapatkan pelatihan mengenai perubahan iklim dan aktivitas yang menghasilkan penghasilan tambahan (Nusa Tenggara Barat, *Factsheet*).

World Food Programme telah mempertahankan kerjasama yang erat dengan mitra pemerintah terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan program *Food For Assets*, antara lain dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) di bawah Kementerian Pertanian dalam menerapkan dan memperkuat sistem pemantauan ketahanan pangan. Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan mitra-mitra utama dalam menganalisis ketahanan pangan dari beragam segi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nusa Tenggara Barat (WFP Indonesia*in Review*, 2012).

World Food Programme juga menyelenggarakan workshop tiga pihak, dengan petani dan penduduk desa rawan pangan yang mendapatkan bantuan, juga dengan perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentang pentingnya sinergi upaya adaptasi perubahan iklim, upaya mengurangi potensi rawan pangan, dan upaya mencapai ketahanan pangan, disertai program kunjungan lapangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kontribusi pemerintah diwujudkan dalam bentuk kontribusi tunai, in-kind dan bantuan teknis. Nilai moneter dari kontribusi pemerintah untuk FFA pada tahun 2012 adalah sekitar US $ 150.000 (total tunai dan kontribusi *in-kind*). WFP mengharapkan adanya peningkatan kontribusi dari mitra pemerintah dan masyarakat dalam beragam kegiatan sejenis lainnya, melalui partisipasi yang kuat dan komitmen tinggi yang diberikan antara lain oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres), bagaimana penciptaan kesadaran seluruh masyarakat diangkat pada beberapa isu seputar adaptasi perubahan iklim, perangkat dan solusi melalui kemitraan dengan *World Food Programme* (WFP Indonesia*in Review*, 2012).

Program *Food For Assets* (FFA) *World Food Programme* yang sudah terlaksana di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, yang terlaksana pada tahun 2008 hingga 2010, kegiatan *Food For Assets* tersebut adalah:

1. Dilaksanakan bersama kelompok Ceraken, kegiatan *Food For Assets* yang dilaksanakan adalah *Land development and Food For Training* (FFT), kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa tempat di Nusa Tenggara Barat, antara lain di kecamatan Pringgabaya, desa Labuan Lombok. Kecamatan Sambelia, desa Labuan Pandan. Kecamatan Aikmel, desa Aikmel Utara. Kecamatan Selong, desa Denggen. Kecamatan Pujut, desa Mertak. Dan di kecamatan Praya Barat Daya, desa Kateng. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 hingga April 2009.
2. Kegiatan *Food For Assets* yang dilaksanakan bersama Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP), dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2008, di kecamatan Pujut, desa Teruwai. Kegiatan FFA yang dilaksanakan adalah *Agriculture Road* dan *Planting*juga *Desilting Irrigation Channel*, kegiatan *Agriculture Road* dan *Planting* dilaksanakan di beberapa dusun seperti Grepek dan Tarung Arung. Sedangkan kegiatan *Desilting Irrigation Channel* dilaksanakan di dusun BBD II, BBD III, BBD IV Kanan, BBD IV Tengah, BBD IV Kiri, Talat-Talat Selewar, Talat-Talat Sangkung, Penyawung Tego, dan Penyawung Jero Bunut.

3. WFP berkerjasama dengan Yayasan Bina Karya di kecamatan Sambelia, di desa Belanting dusun Menanga Reak, dan di Labuan Pandan dusun Senang Galih dilaksanakan kegiatan *Land development* (60 ha) dan *Irrigation well*, dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2008.
4. Bersama Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI), program FFA dilaksanakan di beberapa kecamatan Bayan, Kayangan, Sekotong, Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Mother and Child Nutrition & School Feeding* yang terlaksana pada Juni hingga Desember 2008.
5. Bersama Yayasan Satya Dharma Mataram (YSDM) pada bulan Oktober hingga November 2008 di kecamatan Jerowaru dilaksanakan di beberapa dusun seperti Jerowaru BAT, Jerowaru Daye, Sejawe, Pandan, Paek, dan Ketangga Timur. Kegiatannya adalah *Agriculture road (2333 metres)* dan *Desilting irrigation*.
6. Pada bulan Oktober hingga Desember 2008, WFP bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Membangun (YSM) , menjalankan program Food For Assets di kecamatan Sambelia, yang terdiri dari beberapa dusun seperti di Pemongkong, Jelok Buso, Oleng, dan UPT-Pengoros. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *desilting*,embung, dan *planting*(Wawancara, Tarningsih Handayani-*World Food Programme*).



Sumber: (WFP Indonesia*in Review*, 2012).

Gambar 4.8
Bendungan Rentung II Desa Tanak Beak Nusa Tenggara Barat

Gambar 4.8 adalah salah satu contoh hasil dari program *Food For Asset*s di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rentung II (DAM Rentung II) yang telah selesai dikerjakan oleh masyarakat setempat dan hasil kerjasama *World Food Programme* dan Dinas Pertanian Loteng, bendungan tersebut mampu mengairi 175 hektar sawah. Ada 28 unit tangkapan air (DAM atau bendungan dan embung), menampung lebih dari 140.000 m3, bendungan untuk persediaan air dan irigasi, menampung air dalam waduk. Air ini kemudian dialirkan ke pertanian dengan menggunakan pipa atau saluran besar, memfasilitasi akses terhadap air untuk penggunaan pertanian dan kehidupan sehari-hari. Bendungan tersebut adalah pengendali banjir, menampung air selama hujan deras untuk mengurangi banjir pada hilir sungai. Dan fungsi embung-embung adalah untuk menampung air di musim hujan dan digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.



Sumber: (WFP Indonesia*in Review*, 2012).

Gambar 4.9
Agroforestry di Nusa Tenggara Barat

Dalam gambar 4.9, hasil dari program *Food For Assets* adalah lebih dari 4.000 hektar telah direhabilitasi dengan hampir 4 juta pohon (*agroforestry* atau watani). Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan (usahatani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Pada sistem ini, terciptalah keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan lahan sehingga akan mengurangi resiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi serta mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar kebun karena adanya daur-ulang sisa tanaman. WFP merehabilitasi lebih dari 10.000 hektar lahan yang rusak (terdegradasi) dengan lebih dari empat juta pohon yang ditanam. WFP bekerjasama dengan Kantor Ketahanan Pangan dalam kegiatan pembuatan Rumah Kebun pada sekitar 750 rumah tangga termasuk di dalamnya pembentukan Kebun Bibit dan Kebun Percontohan. Rumah kebun tersebut untuk melengkapi inisiatif pemerintah pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).



Sumber: (WFP Indonesia*in Review*, 2012).

Gambar 4.10
Konservasi dan Rehabilitasi Hutan Bakau

Gambar 4.10 adalah konservasi dan rehabilitasi hutan bakau, merupakan program *Food For Assets* dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, upaya yang dilakukan WFP di Nusa Tenggara Barat. Program *Food For Assets* yang dilaksanakan pada tahun 2008, sudah memberikan hasil lebih dari 2,8 juta tanaman bakau yang ditanam pada tahun 2012.Salah satu fungsi utama hutan bakau atau *mangrove* adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Hutan bakau terkenal karena kemampuannya dalam melindungi wilayah pesisir yang rentan terpaan gelombang laut dan mencegaherosi. Bakau dan *silvofishery* memfasilitasi terciptanya rumah dan lingkungan yang baik bagi budidaya kepiting dan udang. *Silvofishery* sebagai sebuah konsep usaha terpadu antara hutan *mangrove* dan perikanan budidaya yaitu budidaya di tambak menjadi alternatif usaha yang sejalan dengan prinsip *blue economy*. Pendekatan terpadu terhadap konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan *mangrove* memberikan kesempatan untuk mempertahankan kondisi kawasan hutan tetap baik, disamping itu budidaya

perairan payau dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Konsep tersebut menawarkan alternatif teknologi berdasarkan prinsip keberlanjutan (*sustainable*). Hal tersebut membantu mengurangi potensi rawan pangan dan menciptakan ketahanan pangan dan gizi masyarakat pesisir serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Melalui program *Food For Assets*, lebih dari 73.000 orang di kabupaten di Nusa Tenggara Barat menerima bantuan. Selain itu, lebih dari 650 petani dan nelayan mendapat pelatihan untuk membantu mereka lebih menjaga hampir 1.250 hektar lahan pesisir dan lahan kritis lainnya. Selain berupaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana, dan mengurangi potensi rawan pangan, program *Food For Assets* juga memberikan insentif bantuan pangan jangka pendek untuk 11.000 rumah tangga miskin, dan mendukung kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan.

4.5 Analisa Peranan *World Food Programme* (WFP) Melalui Program *Food For Assets* (FFA) dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2010

World Food Programme (WFP) sebagai Organisasi Internasional yang menangani bantuan pangan telah melakukan peranannya dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat melalui programnya *Food For Assets* (FFA). Upaya yang dilakukan *World Food Programme* sesuai dengan tujuan dan fungi utama *World Food Programme* yaitu membantu membangun aset dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin yang mengalami kerawanan

pangan khususnya melalui program-programnya, salah satunya ialah program *Food For Assets*.

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu Organisasi Internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana Pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui Kebijakan Nasionalnya. Bahkan saat ini Organisasi Internasional dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung, dimana kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat dunia untuk bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan. Peranan Organisasi Internasional terbagi dalam 3 (tiga) kategori, *World Food Programme* sebagai Organisasi Internasional (*Intergovernmental Organizations*-IGO) dapat dikatakan sebagai:

1. Instrumen, *World Food Programe* digunakan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan, untuk Indonsia dapat mencapai ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di tahun 2015 sesuai *mandate World Food Summit*. Konsep *food resilience* (ketahanan pangan) diperkenalkan pada saat badan PBB, *Food Agricultural Organization* (FAO) mengadakan *World Food Summit* dan mengeluarkan Deklarasi Roma tentang ketahanan pangan (*food resilience*) pada 1996 di Roma.

   Ketahanan pangan dalam Deklarasi Roma merupakan konsep yang dianut Pemerintah di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor

68 Tahun 2002. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga (pasal 1 ayat 17). Pemerintah mengemban tugas utama mengatur, mengendalikan, dan mengawasi ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (pasal 45).

Masalah kerawanan pangan menjadi isu penting di dunia internasional. Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat bahwa setiap lima detik, satu orang meninggal dunia akibat kelaparan di Asia. Walaupun sesungguhnya terdapat pangan yang cukup di dunia ini, hanya saja bahan pangan tersebut tidak mencapai daerah-daerah yang kekurangan. Untuk dapat menangani permasalahan tersebut, *World Food Programme* yang merupakan salah satu badan PBB dimandatkan untuk menangani masalah pangan dengan berbagai macam upaya.

Kondisi ketahanan pangan global tidak berbeda jauh dengan keadaan di Indonesia, yaitu masih saja terdapat kemiskinan di berbagai negara, terutama di Afrika dan beberapa negara di Asia.Untuk memenuhi komitmen *World Food Summit* yang menegaskan kembali komitmen deklarasi *World Food Summit* 1996, yaitu untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan mengikis kelaparan di seluruh negara. Sasarannya adalah mengurangi jumlah penduduk rawan pangan atau miskin dari 800 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi tinggal 400 jiwa pada tahun 2015. Sejalan dengan itu, pangan telah menjadi fokus internasional yang memerlukan upaya, baik antar lembaga pemerintah, lembaga

internasional, dan juga peran masyarakat sendiri. Untuk itu, dalam merumuskan paragraf naskah WFS:fyl-2002 dan tindak lanjutnya, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki perhatian terhadap peran hubungan dengan kelembagaan internasional (secara bilateral, multilateral, dan antar lembaga di lingkup PBB) yaitu dengan *World Food Programme* (WFP), dan peran *civil society* (LSM atau NGO), urbanisasi, petani miskin, kesempatan kerja, dan program adaptasi perubahan iklim upaya mengurangi potensi rawan pangan dan pengembangan ketahanan pangan.

2. Arena, Indonesia sebagai anggota *World Food Programme* (WFP) menjadikan Organisasi Internasional tersebut sebagi tempat atau wadah untuk membicarakan dan menggalang kerjasama mengenai permasalahan kerawanan pangan, upaya mencapai ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di tahun 2015 (*mandate World Food Summit*), dimana diadakannya pertemuan tahunan Badan Eksekutif *World Food Programme* (WFP). Pada periode 2003-2005, Indonesia kembali menjadi anggota *Executive Board* WFP. Pemilihan *Executive Board* tersebut dilaksanakan pada sidang ke-123 Dewan *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada 28 Oktober - 2 November 2002 di Roma, Italia. Indonesia sempat berhenti sebagai anggota *Executive Board* sejak tahun 1997 sampai 2001, karena pada saat itu Indonesia mendapat kehormatan menjadi ketua Dewan FAO.

3. Aktor independen, dalam menjalankan fungsinya maka Negara-negara anggota *World Food Programme* (WFP) adalah aktor independen yang bekerjasama untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan melakukannya tanpa adanya pengaruh dari pihak diluar *World Food Programme* (WFP).

Dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat, WFP bekerjasama dengan sektor pemerintah serta NGO setempat dalam memberikan menjamin kebutuhan pangan dan kemandirian masyarakat, dalam hal menghasilkan pangan, pemberdayaan masyarakat dan mengupayakan untuk mengurangi potensi rawan pangan.

Program FFA memiliki batasan waktu pelaksanaan, program dilaksanakan pada tahun 2008 dan selesai dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010, dan keseluruhan bantuan WFP sudah berakhir sejak 2012, dan secara resmi sudah tidak ada lagi kantor WFP di Mataram Nusa Tenggara Barat pada Maret 2014, hal tersebut sesuai dengan MOU antara *World Food Programme* dengan Pemerintah Indonesia bagian *article* 1 poin 1.4 dan 1.7, bahwa: Tujuan dan Deskripsi PRRO No. 10069.2, secara khusus, tujuannya adalah untuk: "Berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga yang rentan terhadap kerawanan pangan melalui *Food for Work* (FFW) (*Food For Assets* FFA) dan *Food for Training* (FFT) untuk membangun kapasitas masyarakat. Operasi dilaksanakan selama periode dari 1 April 2008 sampai dengan 31 Desember 2010. Dan bagian *article* 2 poin a,b, dan d. Lingkup Kegiatan, kegiatan dalam PRRO No.10.069,2 terdiri:

a. *Mother-and-Child Nutrition* (MCN) layanan di posyandu: penyediaan makanan yang bergizi, dan pendidikan kesehatan dan gizi,

b. *School Feeding*: penyediaan makanan yang bergizi, dan pelatihan berbasis kurikulum,

d. *Food for Work* (FFW) dan *Food for Training* (FFT) dilaksanakan di daerah pedesaan yang mengalami rawan pangan.

Tabel 4.4
Wilayah di Nusa Tenggara Barat yang Mendapatkan Bantuan Program *Food For Assets* (FFA) Tahun 2008-2010

Kabupaten	Kecamatan	Prioritas Rawan Pangan	Bantuan Program *Food For Assets* (FFA) *World Food Programme* (WFP)
Lombok Tengah	Praya Barat	1	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Tengah	Pujut	1	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Tengah	Praya Timur	1	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Tengah	Janapria	1	-
Lombok Tengah	Kopang	1	-
Lombok Tengah	Praya	1	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Tengah	Praya Tengah	1	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Tengah	Jonggrat	1	-
Lombok Tengah	Pringgarata	1	-
Lombok Tengah	Batukilang	1	-
Lombok Tengah	Batukilang Utara	1	-
Lombok Timur	Keruak	1	-
Lombok Timur	Jerowaru	1	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Timur	Sakra	1	-
Lombok Timur	Sakra Utara	1	-
Lombok Timur	Sakra Timur	1	-

Kabupaten	Kecamatan	Prioritas Rawan Pangan	Bantuan Program *Food For Assets* (FFA) *World Food Programme* (WFP)
Lombok Timur	Terara	1	-
Lombok Timur	Sikur	1	-
Lombok Timur	Masbagik	1	-
Lombok Timur	Pringgasela	1	-
Lombok Timur	Sukamulia	1	-
Lombok Timur	Labuan Haji	1	-
Lombok Timur	Pringgabaya	1	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Timur	Suela	1	-
Lombok Timur	Wanasaba	1	-
Lombok Utara	Pemenang	1	-
Lombok Barat	Sekotong Tengah	2	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Barat	Lembar	2	-
Lombok Barat	Gerung	2	-
Lombok Barat	Labu Api	2	-
Lombok Barat	Kediri	2	-
Lombok Barat	Kuripan	2	-
Lombok Barat	Narmada	2	-
Lombok Barat	Lingsar	2	-
Lombok Barat	Gunung Sari	2	-
Lombok Barat	Batu Layar	2	-
Lombok Timur	Montong Gading	2	-
Lombok Timur	Suralaga	2	-
Lombok Timur	Serong	2	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Timur	Aikmel	2	Mendapatkan Bantuan FFA

Kabupaten	Kecamatan	Prioritas Rawan Pangan	Bantuan Program *Food For Assets* (FFA) *World Food Programme* (WFP)
Lombok Timur	Sambelia	2	Mendapatkan Bantuan FFA
Sumbawa	Sumbawa	2	-
Sumbawa	Lantung	2	-
Dompu	Hu'u	2	-
Dompu	Pajo	2	-
Dompu	Dompu	2	-
Dompu	Woja	2	-
Dompu	Kilo	2	-
Dompu	Kempo	2	-
Dompu	Manggelewa	2	-
Dompu	Pekat	2	-
Bima	Woha	2	-
Bima	Belo	2	-
Sumbawa Barat	Maluk	2	-
Sumbawa Barat	Brang Rea	2	-
Lombok Utara	Tanjung	2	-
Lombok Utara	Bayan	2	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Tengah	Praya Barat Daya	3	Mendapatkan Bantuan FFA
Lombok Timur	Sembalun	3	-
Sumbawa	Lenangguar	3	-
Bima	Wawo	3	-
Sumbawa Barat	Jereweh	3	-
Lombok Utara	Gangga	3	-
Lombok Utara	Kayangan	3	Mendapatkan Bantuan FFA

Sumber: Data *World Food Programme* dan Badan Ketahanan Pangan (diolah).

Dari tabel 4.4, terlihat jelas bahwa bantuan program *Food For Assets* (FFA) yang diberikan *World Food Programme* (WFP) dari tahun 2008 hingga tahun 2010, sebagian besar diberikan atau di prioritaskan pada daerah Lombok, sedangkan wilayah lainnya tidak atau belum mendapatkan bantuan, hal tersebut bisa dikarenakan *World Food Programme* (WFP) memberikan bantuan pada wilayah yang memang sangat membutuhkan bantuan atau berada pada prioritas 1 rawan pangan, atau adanya kendala-kendala lain yang pada akhirnya bantuan tidak dapat terlaksana, atau wilayah lain mendapatkan bantuan diluar dari *World Food Programme* (WFP), atau wilayah yang tidak mendapatkan bantuan program *Food For Assets* (FFA) sebenarnya mendapatkan bantuan dari *World Food Programme* (WFP) namun dalam bentuk program lain, karena program *World Food Programme* (WFP) tidak hanya *Food For Assets* (FFA). Setelah tahun 2010, program *Food For Assets* (FFA) dan program-program *World Food Programme* (WFP) lainnya di Nusa Tenggara Barat masih dilanjutkan hingga tahun 2013, dan berakhir pada bulan maret 2014, dimana kantor *World Food Programme* (WFP) sudah tidak ada lagi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan bantuan *World Food Programme* (WFP) sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan para staf *World Food Programme* (WFP) dipindahkan ke Nusa Tenggara Timur untuk memberi bantuan selanjutnya untuk memprioritaskan kawasan Indonesia timur (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua). Juga hal ini dikarenakan dari pelatihan-pelatihan yang diberikan, warga Nusa Tenggara Barat banyak mempelajari cara bertani yang baik dalam hal kesiapan menghadapi perubahan iklim yang terjadi di Nusa tenggara Barat, sepanjang tahun 2012 Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat dengan menjamin berjalannya subsistem distribusi pangan, ketersediaan pangan dan konsumsi dengan baik. Beberapa keberhasilan pun diraih, salah satu bukti keberhasilan kinerja ketahanan pangan ialah dengan ditetapkannya Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH. M. Zainul Majdi sebagai salah satu penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara pada kategori Pembina Ketahanan Pangan. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012 didasarkan pada inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga, regional, serta nasional diterima juga oleh Kepala Daerah dan Kelompok Tani di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini artinya *World Food Programme* (WFP) ikut berkontribusi atau berperan sebagai Organisasi Internasional yang berupaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.